

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PONTIANAK BARAT

Oleh:

Elsa Dwi Desti^{1*}

NIM : E1013161003

Patriani², Deni Darmawan²

*Email: e1013161003@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan adanya masalah di dalam Program Bantuan Langsung Tunai yang dibagikan secara tidak merata di Kelurahan Sungai Beliuang Kecamatan Pontianak Barat, Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan analisis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III dalam Agustino (2006:158) yang terdiri dari : 1) Komunikasi. Menyampaikan informasi tentang suatu Program Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang harus mendapatkan bantuan dari pemerintah sesuai dengan data yang ada di Kelurahan; 2) Sumber Daya. Pegawai/Staf harus menyampaikan kepada masyarakat miskin tentang apa saja kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai yang sedang berjalan di setiap tahunnya agar wewenang dan fasilitas yang diterapkan bisa berjalan dengan baik; 3) Sikap. Jika masyarakat miskin yang membantah akan data yang tidak sesuai dengan data yang ada di kelurahan dan RT setempat, hal ini akan menjadi konflik karena merasa mereka harus mendapatkan bantuan dari pemerintah; 4) Struktur Birokrasi. SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam pembagaaian dana Bantuan Langsung Tunai harus berjalan sesuai dengan SOP yang ada baik dalam pendataan dan pengambilan dana Bantuan Langsung Tunai. Adapun saran dari penelitian ini adalah adanya kerjasama didalam suatu pendataan yang digunakan oleh Pemerintah Kelurahan Sungai Beliuang Kecamatan Pontianak Barat, agar Program Bantuan Langsung Tunai bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran sesuai dengan data masyarakat miskin yang membutuhkan.

Kata Kunci: Implementasi, Program Bantuan Langsung Tunai, Masyarakat Miskin.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Berbagai Program Bantuan Langsung Tunai yang di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin kini pemerintah memberikan kembali bantuan yang bersangkutan dengan program BLT yang akan di berikan kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya dengan diterbitkannya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang.

Sebelum terjadinya pandemi Covid-19 permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang terus dihadapi oleh sejumlah daerah di Indonesia tidak terkecuali di daerah Pontianak Barat sehingga Pemerintah terus

merencanakan bermacam-macam program yang dapat membantu masyarakat miskin saat ini di Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat. Beberapa program yang kini sudah dilakukan oleh Pemerintah untuk membantu mengurangi angka kemiskinan diantaranya dengan membuat program bantuan beras miskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), BPJS, Bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan data resmi BPS hasil jumlah penduduk miskin di Pontianak Barat Kelurahan Sungai Beliang berjumlah 70.007 jiwa atau 19.356 KK. Peranan data kemiskinan menjadi sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program diatas. Kini bantuan yang di dapatkan oleh masyarakat miskin setelah terjadinya bencana nonalam Covid-19 adalah kebijakan BLT hanya berlaku tiga bulan yaitu dari April sampai Juni 2020 dengan besaran per-bulan untuk

setiap keluarga Rp 600.000. Dalam Permendes terbaru ini, periode diperpanjang enam bulan yaitu sejak Juli sampai Desember 2020. Adapun besaran per-bulan yaitu Rp300.000 untuk setiap keluarga.

Implementasi kebijakan berkaitan dengan persoalan sekitar usaha melaksanakan program atau kebijakan, mengadministrasikannya, maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu dari program atau kebijakan tersebut kepada masyarakat (Suwitri, 2008 : 80). Apakah pelaksanaan program BLT telah sesuai dengan *standard operating procedure (SOP)*, karena pada dasarnya SOP merupakan panduan atau petunjuk pelaksanaan, atau petunjuk teknis bagi unit organisasi pelaksana kegiatan implementasi kebijakan. Sebagai produk hukum, SOP tersebut harus dipatuhi, karena telah menjadi ketentuan formal yang berlaku (yang dianggap sebagai solusi terbaik).

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Dalam pelaksanaan program BLT di Kelurahan Sungai Beliang Pontianak Barat terdapat beberapa masalah, antara lain :

1. Adanya pembagian Dana BLT yang tidak merata.
2. Masih adanya antrian panjang saat pembagian Dana BLT di kantor POS.

3. Fokus Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka untuk terarahnya suatu pembahasan didalam suatu penelitian ini, perlu adanya fokus masalah untuk terwujudnya hasil yang nyata untuk masyarakat miskin di Pontianak Barat Sungai Beliang, yaitu sebagai berikut “Implementasi Kebijakan Program BLT Di Kelurahan Sungai Beliang Pontianak Barat Tahun 2020”.

4. Rumusan Masalah

Terdapat beberapa dari permasalahan yang telah terangkum dalam identifikasi masalah, untuk itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan program BLT tahun 2020 di Kelurahan Sungai Beliang Pontianak Barat berjalan dengan efektif sesuai dengan data KK masyarakat miskin yang mendapatkan Program BLT ?

2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program BLT tahun 2020 di Kelurahan Sungai Beliang Pontianak Barat ?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan program BLT tahun 2020 di Kelurahan Sungai Beliang Pontianak Barat.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat keberhasilan pelaksanaan program BLT tahun 2020 di Kelurahan Sungai Beliang Pontianak Barat.

6. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam pengembangan teori kebijakan publik sebagai salah satu dimensi dari ilmu administrasi publik. Substansi penelitian difokuskan pada pengembangan teori dan konsep implementasi kebijakan publik

dengan pendekatan dinamika masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

Dinamika masyarakat dipandang sebagai sosial capital dalam implementasi kebijakan publik melalui sinergisitas dan jejaring kebijakan diantara pelaksanaan kebijakan. Masukkan bagi Kepala Lurah Sungai Beliang Pontianak Barat dan Masyarakat untuk menyempurnakan proses implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang lebih berorientasi pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai sasaran program.

Dengan mengetahui keterlibatan (partisipasi) masyarakat dalam program tersebut diharapkan penelitian ini akan dapat memberdayakan masyarakat dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan publik.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi dan preposisi yang saling berhubungan yang disusun

secara sistematis sebagai hasil dari penulisan ilmiah terdahulu dengan menggunakan seperangkat metodologi penulisan tertentu untuk menjelaskan gejala tertentu atau hubungan-hubungan dalam fenomena yang sedang diteliti.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, ada beberapa faktor yang dianggap mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi itu. Menurut George Edward III (1980:10) ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Yaitu :

1. **Komunikasi(*communication*)** ;

Komunikasi merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dalam menyampaikan informasi, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesimpang siuran.

2. **Sumber Daya (*resources*)**

sumber daya merupakan implementator dari kebijakan yang dikeluarkan. sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Dalam implementasi sebuah kebijakan, sumber daya dari kebijakan itu harus relatif cukup jumlahnya, mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

3. **Sikap(*dispositions or attitude*)**;

merupakan sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Implementator kebijakan harus memiliki inisiatif dalam mendukung ketercapaian sebuah kebijakan itu. Sikap dalam melaksanakan suatu program harus sungguh-sungguh agar semua program bisa berjalan secara baik. Sifat juga menjadi unsur

dalam motivasi tercapainya suatu program yang dijalankan karena harus adanya arah respon dari pelaksana terhadap implementasi kebijakan dan intensitas.

4. Struktur Birokrasi(*bureaucratic structure*) ;

tahapan implementasi kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan tahapan birokrasi baik antar lembaga maupun dengan lembaga yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

2. Alur Pikir Penelitian

Bantuan Langsung Tunia saat ini dapat meringankan beban perekonomian masyarakat miskin, dimana perekonomian saat ini semakin tahun semakin meningkat dalam kebutuhan sehari-hari. Program ini juga dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk membebaskan masyarakat miskin dari status kemiskinan.

Program Bantuan Langsung Tunai yang telah di laksanakan oleh

Kelurahan Sungai Beliang bertujuan untuk dapat membantu masyarakat miskin. Hal ini bertujuan membantu perekonomian mereka agar angka kemiskinan yang ada di Kelurahan Sungai Beliang dapat turun di setiap tahunnya.

Ringkasan Permendes PDPTT No. 7 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8A disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut :

1. Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, meliputi :

- a) Pandemi Corona Virus Disease 2020,
- b) pandemi flu burung,
- c) wabah penyakit Cholera; dan/atau
- d) penyakit menular lainnya.

2. Penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 2020

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BLT kepada keluarga miskin di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, bantuan sosial tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

(3a) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT.

(3b) Data penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa :

1. Masa penyaluran BLT 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;

2. Besaran BLT perbulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);

3. Besaran BLT perbulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perkeluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);

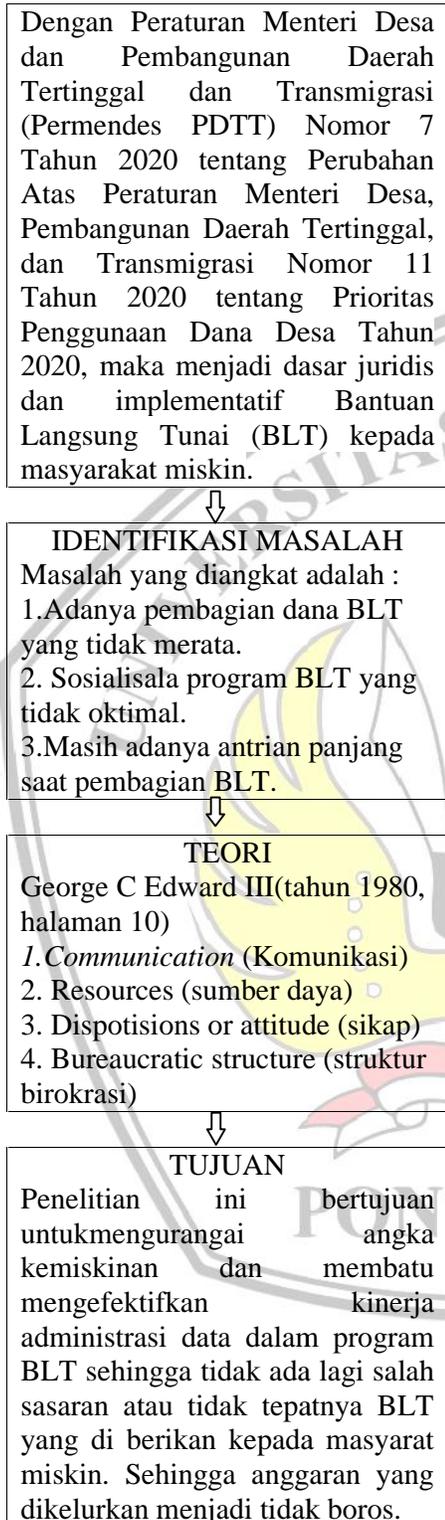
4. BLT sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;

5. Keluarga Penerima Manfaat BLT sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data Keluarga Penerima Manfaat sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Kelurahan; dan berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dinyatakan tidak berlaku.

Adapun tahapan yang dilaksanakan berkaitan dengan penyaluran dan BLT adalah :

- 1) Sosialisasi Program BLT, dilaksanakan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika Departemen Sosial, bersama dengan Kementrian/Lembaga di Pusat bersama-sama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, beserta aparat kecamatan, dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (Karang Taruna, Kader Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat).
- 2) Penyiapan data RTS dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Daftar nama dan alamat yang telah tersedia disimpan dalam sistem database BPS, Departemen Sosial, dan PT. Pos Indonesia.
- 3) Pengiriman data berdasarkan nama dan alamat RTS dari BPS Pusat ke PT. Pos Indonesia.
- 4) Pencetakan kartu penerima berdasarkan data yang diterima oleh PT. Pos Indonesia.
- 5) Pengiriman data masyarakat miskin ke kantor Pos.
- 6) Pengecekan kelayakan daftar RTS di tingkat desa/kelurahan.
- 7) Penerima program Keluarga Harapan juga akan menerima BLT, sehingga dimasukkan sebagai RTS yang masuk dalam daftar.
- 8) Pembagian kartu penerimaan BLT kepada RTS oleh petugas pos dibantu oleh aparat desa/kelurahan, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, serta aparat keamanan setempat jika diperlukan.
- 9) Pencairan Dana BLT oleh masyarakat dapat dilakukan di kantor Pos sesuai dengan kode Pos yang telah ditetapkan oleh Kelurahan setempat.

Kerangka Fikir



1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh George Edward III (1980:10) yaitu : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan dengan pertimbangan bahwa terdapat beberapa masalah yang harus diteliti yaitu:

C. METODE PENELITIAN

1. Adanya pembagian dana BLT yang tidak merata.
2. Masih adanya antrian panjang saat pembagian BLT.

3. Subyek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkait langsung dalam Program BLT di Kelurahan Sungai Beliang Pontianak Barat untuk memberikan segala bentuk data dan informasi dalam mengulas masalah Implementasi Kebijakan Program BLT di Kelurahan Sungai Beliang Pontianak Barat. Adapun informasi yang di dapatkan oleh Plaksana Lapangan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kepala Lurah
2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Beliang (Tim pelaksana program BLT Covid-19)
3. Ketua RT / RW : 001/016 (Komplek Alpokat Indah jalur II)
4. Masyarakat yang mendapatkan dana BLT Covid-19 di Komplek Alpokat Indah Jalur II, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif; yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisis berdasarkan metode yang telah diterapkan dan bertujuan untuk mengetahui Program BLT dan membantu masyarakat miskin di Kelurahan Sungai Beliang. Adapun alat analisis yang di gunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Lexy J. Moleong (1991:135)

“Mendefinisikan bahwa wawancara dengan tujuan percakapan tertentu. Dalam metode ini peneliti dan responden secara langsung (*face to face*) untuk memperoleh informasi secara lisan dengan mendapatkan data tujuan yang bisa menjelaskan masalah penelitian”. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan sesi tanya jawab secara langsung dengan kepala Lurah Sungai Beliang yang terkait dengan masalah penelitian ini.

2. Observasi

Riduwan (2004 : 104)

“Mendefenisiskan suatu teknik

pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan”. Mencatat semua kejadian dan fenomena-fenomena yang relevan agar sesuai dengan permasalahan penelitian sebagai data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2015: 329)

“Mendefensiiskan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian”. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel yang terkait dengan masalah yang diteliti.

5. Instrumen Atau Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Berikut ini akan dijelaskan teknik-

teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut.

1. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara digunakan sebagai teknik untuk pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan sebuah studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui tentang hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari secara tepat dan sesuai fenomena.

2. Teknik Observasi.

Teknik Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian. Adanya observasi penelitian ini dimaksudkan agar kegiatan observasi ini dilaksanakan secara terarah sesuai

dengan aspek-aspek penelitian yang telah dikemukakan.

Melakukan teknik observasi penelitian ini menggunakan kamera sebagai alat untuk mengumpulkan data yang relevan dalam penelitian ini, kemudian mendeskripsikannya sesuai fakta yang ditemukan di lapangan. kesimpulan bahwa observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

6. Analisis Data

Teknik Analisis Data Miles & Huberman (1992:19), mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (1) reduksi data (data reduction);

(2) paparan data (data display); dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying).

Analisis data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Menyangkut analisis data Kualitatif sebagai berikut:

1. Data Reduction (reduksi data)

Sugiyono (2015:247) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Data Display (penyajian data).

Miles & Huberman (1992:17) mengatakan bahwa data yang sudah

direduksi maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

3. Kesimpulan Data Dan Verifikasi (Conclusion and Data Verification)

Gunawan (2013:212) menjelaskan bahwa simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

D. HASIL PENELITIAN

Program dana BLT Covid-19 pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan yang membantu perekonomian masyarakat miskin, hal ini juga merupakan program pemerintah membantu mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia dan di setiap wilayah hal ini juga bertujuan membuktikan tentang kebenaran status kemiskinan yang ada pada masyarakat. Akan tetapi masih terdapatnya Program yang tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan yang seharusnya mendapatkan program ini. Adapun masyarakat yang mendapatkan Program Dana BLT Covid-19 sesuai dengan table sebagai berikut :

Gambar Masyarakat yang mendapatkan Dana BLT



Sumber : Kelurahan Sungai Beliang

Dari gambar diatas terlihat jelas angka kemiskinan yang seharusnya mencapai 32% mendapatkan Dana BLT Covid-19 kini yang tercampum mendapatakan hanya 24% hal ini juga di kata kan oleh Kepala Kantor Kelurahan Bapak Akhmad bahwa Program ini tidak tetap sasaran, hal ini sangat disayangkan dengan data yang digunakan juga menjadi masalah ketidak tepatan sasaran masyarakat yang menerima Program Dana BLT Covid-19 ini.

Proses bantuan kepada masyarakat miskin juga telak banyak dilakukan pemerintah salah satunya Program Dana BLT Covid-19 yang saat ini berlangsung sesuai dengan aturan dan alur yang telah di tetapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat, Pelayanan juga dapat di ukur sesuai dengan tujuan sehingga dapat di tetapkan standar baik dalam hal ini waktu yang di perlukan maupun hasilnya.

Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan

harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Terkait dengan Program Dana BLT Covid-19 di Kantor Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, penelitian menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C Edward III (tahun 1980, halaman 10) ada 4 faktor yaitu

1.1. Komunikasi

Upaya untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dalam menyampaikan informasi, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesimpang siuran.

Mengkomunikasikan berbagai program BLT yang telah di keluarkan oleh pemerintah kepada masyarat miskin, sesuai dengan prosedur yang di tetapkan oleh pemerintah, hal ini dilakukan agar program yang di berikan oleh

pemerintah bisah berjalan dengan baik dan optimal.

1.2. Sumber Daya

Implementator dari kebijakan yang dikeluarkan. sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Dalam implementasi sebuah kebijakan, sumber daya dari kebijakan itu harus relatif cukup jumlahnya, mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, dukungan dari lingkungan untuk mensukseskan implementasi kebijakan, wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

Factor sumberdaya yang menjadi peran penting di dalam suatu program BLT hal ini berkaitan dengan adanya sumberdaya yang berhubungan langsung dengan kebijakan program, sumber daya yang harus memadai agar program ini tidak disalahkan gunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan orang-orang yang

mengambil keuntungan di dalam program ini.

1.3. Sikap

Sebuah implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Implementator kebijakan haruslah memiliki inisiatif dalam mendukung ketercapaian sebuah kebijakan itu. Sikap tim pelaksana di dalam menjalankan tugas harus tetap netral tanpa memilah dan milih-milih antara keluarga dan masyarakat umum, hal ini banyak terjadi di lapangan di dalam berbagai program BLT yang sebelumnya, lebih mnedahulukan keluarga, kerabat dekat dan tetangga, sikap ini yang harusnya tidak boleh sama sekali dilakukan, sebagai tim pelaksana harunya memiliki sikap yang netral agar program bisa berjalan dengan sukses.

1.4. Struktur Birokrasi

Tahapan implementasi kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan tahapan birokrasi baik antar lembaga maupun dengan lembaga yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam

mendukung keberhasilan implementasi.

Struktur birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus diikuti dan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, tujuan dari SOP ini juga melancarkan suatu program agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis dilakukan pada BAB sebelumnya menggunakan judul skripsi Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Pontianak Barat dapat ditarik kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan hasil terdapat adanya masyarakat yang sudah wafat namun namanya masih terdaftar sebagai penerima Dana BLT Covid-19 hal ini menjadi masalah ketidak validnya suatu data dan ketidak tertiban antara ketua RT yang masih memberikan undangan Dana BLT Covid-19 kepada masyarakatnya yang telah diketahui bahwa sudah wafat namun masih di alihkan kepada ahliwarisnya yaitu anaknya.

2. Saran

Masih banyak Sikap ketidak terbukaannya dari beberapa aspek dan seharusnya Kelurahan Sungai Beliang harusnya lebih tegas kepada Ketua RT yang masih menyembunyikan status warganya agar program ini tetap sasaran kepada penerima yang seharusnya menerima, sangat disayangkan dari hasil survei dilapangan banyak warga yang di golongkan dalam keadaan menengah dan mampu mendapatkan Program Dana BLT Covid-19 ini, hal ini sangat di sayangkan untuk anggaran yang seharusnya jatuh kepada orang yang tepat namun malah jatuh ke masyarakat yang salah, masyarakat yang tidak seharusnya menerima bantuan ini.

Komunikasi yang harus di ubah agar nanti program-program selanjutnya yang di keluarkan oleh pemerintah bisa tetap sasaran dan berjalan dengan baik, komunikasi yang terjadi dilapangan banyaknya indikator yang salah dalam menyampaikan informasi tentang program BLT ini, masyarakat yang masih awam hingga harus berkali-

kali menayakan kepada petugas dan ke kantor lurah.

Tim pelaksana di dalam sumber daya harus lebih merangkul masyarakat miskin agar tidak terjadi kata-kata pilihkasih di lapangan, lebih menjelaskan secara benar dan detail agar mereka dapat memahami apa yang telah di sampikan oleh tim pelaksana, agar tidak ada lempar-lemparan untuk menyampaikan informasi terkait dengan program ini. Pembagian Undangan Dana BLT Covid-19 harus mematuhi alur proses yang telah ditetapkan, yaitu melibatkan ketua RT/RW, karena masing-masing tahap proses telah disediakan biaya pelaksanaan.

Lokasi pencairan dana BLT dibuat lebih banyak, terutama untuk mendukung ketertiban protocol kesehatan dan untuk meringankan beban biaya transportasi masyarakat miskin, juga disarankan untuk penambahan loket pengambilan Dana BLT Covid-19 karena melihat antrian yang sangat panjang dan mencengah penularan virus Covid-19.

F. REFRENSI

Buku-Buku :

Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Abdullah, M.Sy. 1988, *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. Second Edition, Chicago, Holt, Rinehart and Winston.

Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Bromley, Daniel W. 1989, *Economic Interest and Institutions: The Conceptual Foundation of Public Policy*, New York: Basil Blackwell Ltd

Creswell, W. John. 1994. *Research design, Qualitative & Quantitative Approaches*. New Delhi: Sage Publications.

- Denzin K. Norman dan Lincoln S. Yvonna. 2009. *Hand Book Of Qualitative Research*. New Delhi: Sage Publications.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Polic (Menerapkan Kebijakan Publik.)*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Edward III, Agustino. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Goggin, M.L, Ann O'M Bowman, James P Lester & Laurence J.O'Toole,Jr, 1990, *Implementation Theory and Practice: Toward a Third Generation*, London : Scott, Foresman and Company.
- Hamidi. 2004, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Moleong, Lexy J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mujani, S, 2020, (segera terbit). "Asesmen publik atas kinerja pemerintah Indonesia menangani wabah Covid-19. Sebuah penjelasan ekonomi politik." *Jurnal Penelitian Politik*.
- Riduwan, (2004). *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan. 2003. *The Policy-Making Process*. Engleword Cliffs: Prentice Hall.
- Wahab, SA., 2001, *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Edisi Kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Dokumen :**
- Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2020

tentang Prioritas Pembangunan
Dana Desa Tahun 2020.

Permendes PDTT N0. 7 Tahun 2020
ayat 3 dan ayat 4 pasal 8A
disisipkan 2 ayat yakni ayat 3a
dan 3b.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang – Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Uang Negara dan
Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Covid-
19.

Sumber Internet :

Badan Pusat Statistik, 2019, Tingkat
Kemiskinan Kelurahan (Penjelasan
Ringkas), BPS, Pontianak.

---, 2019, Laporan Akhir Pendataan
Sosial Ekonomi Kelurahan Sungai
Beliung Pontianak Barat, Pontianak

---, 2020, Penduduk Akhir Tahun
2020 Hasil Registrasi, Badan Pusat
Statistik, Pontianak.